

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DALAM MENFASILITASI MASYARAKAT PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KECAMATAN TANGAN-TANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**ABDUL GAFUR
NIM. 441106482**

**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Diajukan Oleh:

**ABDUL GAFUR
Nim. 441106482**

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 04 Agustus 2017 M
10 Dzulkaidah 1438 H

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Lembong Misbah, MA
NIP. 1974052 2200604 1 003**

**Nurul Husna, M.Si
NIP. 19780612 200710 2 002**

Penguji I,

Penguji II,

**Rosnidasari, M.Si., Ph.D
NIP. 19721222 200312 2 004**

Zamzami, S.Sos

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,**

**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 19641220 198412 2 001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL GAFUR
Nim : 441106482
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh,
Yang membuat pernyataan,

ABDUL GAFUR
NIM. 441106482



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah sukses untuk pekerjaan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mu kamu berharap."

(Q.S. Alam Nasyrah: 11)

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah [1183]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(Q.S. Luqman: 27)

Ya Allah ...

*Terimakasih atas hidayah dan karunia yang telah Engkau berikan padaku
Tiada kata yang dapat ku ucapkan selain bersyukur kepada Mu, ya Allah
Meskipun banyak kata yang ingin kulukiskan namun tidak akan habis-habisnya dalam
mengenang Asma Mu.*

Dengan ridha Mu ya Allah ..

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua ku
Ayahanda Rajuddin dan Nur Insani.*

*Terimakasih Ayah, Ibu yang dapat ananda ucapkan
Sungguh ananda tidak dapat membalas semua budi dan jasa Ayah dan Ibu, hanya do'a
yang dapat ananda curahkan semoga Allah Swt membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu.*

*Untuk Keluarga, Guru-guru, sahabat ku semua, yang menjadi sumber motivasi, ku
ucapkan terimakasih. Jasa kalian akan aku kenang selamanya.*

ABDUL GAFUR



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberi rahmat serta karuni-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”.Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingatkan keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian rasa hormat dan puji syukur diutarakan keharibaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis kepada Ayahanda Rajuddin dan Ibunda Nur Insani yang tercinta berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril dan maupun materil sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA selaku pembimbing pertama dan IbuNurul Husna, S.sos.I., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada bapak Hasan Basri, M.Ag sebagai penasehat akademik. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Ibu Dekan, ketua Jurusan PMI-KESOS, Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.

Terima kasih penulis ucapkan Kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Herda, masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya khususnya bagi masyarakat yang memberikan informasi yang cukup banyak tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat saya Irsan, dan kepada teman lainnya dan seluruh kawan-kawan jurusan PMI-PM unit 10 leting 2011, serta kawan-kawan Organisasi DEMA-FDK, SEMA-FDK, HMJ-FDK, HMI-FDK, yang telah memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 25 Januari 2017
Penulis

ABDUL GAFUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
.....	
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	13
B. Kesejahteraan Sosial.....	17
C. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).....	20
D. Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial	24
E. Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	26
.....	
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	28
B. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	37
1. Letak Geografis	37
2. <i>Gampong</i> di Kecamatan Tangan-Tangan dan Kepala <i>Gampong</i>	38
3. Mata Pencarian	40
4. Keadaan Sosial Keagamaan.....	41
5. Karakteristik <i>Gampong</i> di Kecamatan Tangan-Tangan	43
B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	58

C. Peran TKSK Dalam Memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	63
D. Faktor Pendukung dan Penghambat TKSK Dalam Memfasilitasi PMKS	63
1. Faktor Pendukung	68
2. Faktor Penghambat.....	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik 2015/2016
- Lampiran 2: Surat Penelitian Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Camat di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Lampiran 4:Daftar Wawancara
- Lampiran 5: Foto Dokumentasi
- Lampiran 6: Foto Sidang Munaqasyah
- Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: <i>Gampong</i> di Kecamatan Tangan-Tangan Beserta Pimpinannya	38
Tabel 4.2	: Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Kecamatan Tangan-Tangan..	41
Tabel 4.3	: Karakteristik <i>Gampong</i> di Kecamatan Tangan-Tangan	43
Tabel 4.4	: Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Tahun 2015-2016 di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya	50
Tabel 4.5	: Rekapitulasi Data PMKS Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya	63

ABSTRAK

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertujuan untuk menyukseskan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan. Hal ini menjadi kunci untuk mensejahterakan masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan baik dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan. Terlihat dari mulai pendataan dan juga pendampingannya. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada *gampong-gampong* yang ada di kecamatan Tangan-Tangan juga kurangnya dukungan, bantuan, pengakuan, dan juga kerjasama antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK dengan pihak pemerintah, PKSK di wilayah, maupun sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Dinas Sosial adalah: Memberikan bantuan berupa beras miskin (Raskin), bibit bebek, kambing di setiap dusun perkelompok, dan memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang dijalaninya di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya.

Kata Kunci: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 26 Desember 2004, Provinsi Aceh dilanda musibah gempa dan gelombang tsunami yang mengakibatkan masyarakat kehilangan keluarga dan harta benda serta mengalami penderitaan yang panjang, tidak berdaya untuk bangkit, karena kelumpuhan dari segi fisik dan non fisik. Sehingga mengundang para pekerja kemanusiaan dari berbagai Negara ikut berpartisipasi dalam memulihkan kembali Provinsi Aceh. Tidak hanya sektor formal (pemerintah) tapi juga nonformal (non pemerintah) ikut ambil bagian dalam membangun kehidupan baru. Strategi yang digunakan dalam pemulihan itu adalah strategi pemberdayaan, yang mengupayakan masyarakatnya agar tumbuh menuju kemandirian. Tujuan dari peran tenaga kesejahteraan membina pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat menggunakan dan mengakses sumberdaya yang mereka miliki maksimal mungkin, pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat mencapai kesejahteraan.¹

Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi

¹Machali, Imam, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal PMI Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), Vol. VI, No. 2, hal. 156.

masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Kemiskinan diartikan sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan, jika pendapatan anggota masyarakat ini tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Garis kemiskinan dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, posisi manusia dalam lingkungan sekitar, dan kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi.²

Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'adu ayat 11, di sebutkan bahwa:

الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَنْ نَجْعَلَ لَهُمْ مَالًا مَرْدَفًا سَوْءَ ابْقَوْمٍ وَاللَّهُ أَرَادَ إِذًا بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُونَ وَاحْتَىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ



²M. Munanddar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refik Saditama, 1986), hal.228.

Artinya:

“...*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...*”.

Ayat di atas memberikan gambaran tentang konsep perubahan masyarakat, yang menurut M. Quraisy Syihab di tafsirkan sebagai sebuah proses perubahan yang memberi posisi manusia menjadi pelaku perubahan.³ Berdasarkan surat Ar-Ra’adu ayat 11, bahwa ada dua hal pokok dalam proses perubahan sosial menurut Islam. *Pertama*, Islam memandang bahwa perubahan sosial haruslah dimulai dari individu, dari diri sendiri. *Kedua* secara berangsur-angsur, perubahan individu ini harus disusul dengan perubahan struktural. Perubahan kedua ini adalah perubahan secara jamaah, yang sudah distrukturkan secara lebih baik.⁴

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian penyelidikan sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial (*social structure*) dan pranata sosial (*social institution*). Setiap masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki norma-norma. Norma dan pola nilai ini disebut pranata sedangkan jaringan hubungan sosial di mana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisir serta melalui mana posisi-posisi sosial dari individu dan sub kelompok dapat dibedakan dinamakan struktur sosial. Dengan demikian struktur dan pranata sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi menurut paradigma fakta sosial.⁵ Tindakan sosial adalah tindakan individu

³M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Set. Ke-10 (Bandung: Mizan, 1995), hal. 245.

⁴*Ibid.*, hal. 245.

⁵Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 24.

sepanjang tindakannya itu mempunyai arti subjektif bagi dirinya dan di arahkan kepada tindakan orang lain.⁶

Realitas sosial sering di sebut sebagai semua kenyataan yang ada di masyarakat. Kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat bermacam-macam ada kenyataan yang menonjol dan membuat orang memperhatikan yang sering di sebut sebagai *trend*. Namun ada juga kejadian di masyarakat yang tidak pernah dipikirkan. Realitas sosial merupakan kajian dari bidang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, politik, komunikasi. Realitas sering juga disebut juga sebagai fakta sosial, meskipun fakta sosial secara akademis mempunyai karakteristik tertentu. Fakta sosial merupakan realita yang mempunyai sifat *eksternal* (di luar individu), *universal* (mengenai setiap orang), dan *coersiv* (memaksa). Contoh dari realitas sosial adalah kebiasaan, ritual, tindakan sosial, hukum, baik yang tertulis ataupun tidak.⁷

Masalah sosial (problem sosial) merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga ke masyarakatan. Selanjutnya Coleman, J. W and Cressey, menjelaskan bahwa masalah sosial dalam perspektif sosiologis sering disebut sebagai problem sosial (*social problems*) masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Suatu fenomena atau gejala kehidupan dikatakan sebagai

⁶*Ibid.*, hal. 53-54.

⁷Pajar Hatma Indra Jaya, *Analisis Masalah Sosial (Breakdown Teori-Teori Sosial Menuju Praksis Sosial)*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2008), hal. 5.

masalah sosial (*social problems*) adalah apabila: *pertama*, suatu yang dilakukan seseorang itu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok; *kedua*, sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah menyebabkan terjadinya disintegrasi kehidupan dalam kelompok; dan *ketiga*, sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah memunculkan kegelisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok.⁸

Islam mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin, Islam membentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Islam mengajarkan hidup seimbang baik dalam urusan *ibadah* maupun *mu'amalah*. Dengan ibadah seseorang berhubungan langsung dengan Allah Swt secara vertikal. Adapun aspek *mu'amalah*, seseorang akan berhubungan dengan urusan duniawi, seperti ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan nilai-nilai lainnya dalam memenuhi hajat hidup.⁹ Dari uraian tersebut, Allah Swt berfirman dalam (QS.28:77) yang bunyinya sebagai berikut:

أَلَدُّ نِيَامٍ - نَصِيبَكَ تَنْسَ - وَلَا الْآخِرَةَ أَلَدَّ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَوْتٌ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi (QS. Al-Qashash:77).*

Untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Allah Swt, seorang manusia haruslah rajin bekerja dan berbuat sungguh-sungguh mengantarkan kepada cita-cita yang diinginkan. Sesungguhnya bekerja merupakan sarana dan usaha untuk merealisasi langkah-langkah pertumbuhan. Kerja juga mempersiapkan peralatan

⁸Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015), hal. 1.

⁹Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya, 1992), hal. 6.

dan pendanaan bagi langkah-langkah pertumbuhan sekaligus memperkuat ummatul jihad di samping sebagai sarana terbaik untuk memperdalam akar-akar dakwah Islam di masyarakat.¹⁰

Masalah sosial hingga saat ini masih lazim digunakan untuk menunjuk suatu masalah yang tumbuh dan atau berkembang dalam kehidupan komunitas, di mana masalah itu dianggap kurang dan bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma sosial dalam komunitas tersebut. Tumbuh dan berkembangnya suatu masalah sosial sangat tergantung pada dinamika proses perkembangan komunitas itu sendiri. Ketika suatu komunitas mengalami proses perkembangan baik karena adanya faktor-faktor dari luar komunitas, karena adanya faktor-faktor dari dalam komunitas itu sendiri, maupun adanya proses deferensiasi struktural dan kultural biasanya komunitas tersebut akan selalu mengalami guncangan, apalagi jika faktor-faktor perubahan itu datangnya sangat cepat. Dalam situasi seperti ini, tidak semua anggota komunitas siap dalam menerima perubahan itu. Misalnya, ada anggota komunitas yang sangat siap, cukup siap dan bahkan sama sekali tidak siap dalam menerima perubahan itu. Adanya perbedaan dalam kesiapan menerima perubahan itulah, yang biasanya menjadi faktor pemicu tumbuh dan berkembangnya suatu masalah-masalah sosial.¹¹

Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan

¹⁰Abdul 'Aziz Al-Khayyat, *Etika Kerja dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 11.

¹¹Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 23.

mewujudkan taraf kesejahteraan sosial dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial yang ada di lingkungannya.

berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melihat Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dinas Provinsi Aceh telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya melalui beberapa program antara lain: program penanganan Anak Dengan Kecacatan (ADK), Lanjut Usia Terlantar (LUT), Penyandang Disabilitas (PD), Pengemis, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Fakir Miskin (FM), Anak Yatim (Piatu atau Yatim Piatu), Keluarga Rumah Berumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Keluarga Rentan (KR).¹²

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peran tenaga kesejahteraan sosial dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya ini masih terlaksana proses jangka panjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi penelitian ini dilakukan guna mengetahui secara lebih jelas mengenai Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang

¹²Rekapitulasi Data PMKS Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015.

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak di capai melalui serangkaian aktifitas penelitian. Karena segala penelitian yang dikerjakan memiliki tujuan sesuai permasalahannya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam

memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka yang menjadi manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Akademik:
 1. Dapat memperoleh pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat baik terhadap peneliti maupun para pembaca.
 2. Sebagai informasi awal dan dapat ditindak lanjuti bagi yang meneliti lebih jauh dan mendalam.
- b. Secara Praktis:
 1. Penelitian ini bermanfaat untuk penulis juga para pembaca dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi sekaligus bahan masukan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

E. Penjelasan Istilah Penelitian

Peneliti perlu menjelaskan istilah penelitian untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman terhadap kata-kata yang digunakan dalam skripsi ini.

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang ada di bawah tekanan sosial tertentu untuk meraih kembali keseimbangan, kepercayaan dirinya dengan menghilangkan sebab-sebabnya atau kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi institusi-institusi sosial agar bisa diakses oleh anggota masyarakat.

2. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur, dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan, dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan dengan seiring pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku.¹³ Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam sandiwara dan sebagainya.¹⁴

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah warga masyarakat yang peduli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memiliki wawasan tentang ilmu kesejahteraan sosial dan komitmen terhadap usaha kesejahteraan sosial serta mereka bekerja di wilayah kecamatan. Tugas pokok tenaga kesejahteraan sosial kecamatan adalah bersama-sama dengan seluruh kalangan masyarakat lingkungannya dan pemerintah kecamatan,

¹³Vaithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi I*, Ed ke 2. Cet. 2 (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 148.

¹⁴Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), hal. 120.

Kabupaten/Kota serta Provinsi melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan membimbing masyarakat baik bidang agama, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan kesehatan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif untuk terlibat langsung dalam usaha kesejahteraan sosial baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.¹⁵

3. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi, kata 'berdaya' mengandung makna "berkemampuan, bertenaga, berkekuatan", kata 'daya' sendiri bermakna "kesanggupan untuk berbuat, kesanggupan untuk melakukan kegiatan".¹⁶

Pemberdayaan (yang merupakan proses) menjadi manusia sebagai pribadi yang berdaya dengan banyaknya pilihan-pilihan yang bisa diambil tanpa ada tekanan atau paksaan, sebagaimana yang di sampaikan oleh Edi Suharto (2006) bahwa berdaya itu adalah ketika tersedianya pilihan-pilihan untuk memilih atau memiliki sesuatu. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pemberdayaan yang diusahakan, tetapi juga sekaligus menjadi subjek dari pemberdayaan itu sendiri. Ini disebut dengan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Yaitu pada upaya peningkatan taraf

¹⁵Dinas Sosial Provinsi Aceh, 2008, *Panduan TKSK*, hal. 2.

¹⁶Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Ed: I, Cet 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press & Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hal. 19.

hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri.¹⁷

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan juga sebagai suatu proses pembangunan manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.¹⁸

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata bahasa arab, musyarak. Lebih abstrak, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling ketergantungan satu sama lain). Umumnya istilah masyarakat untuk kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur.¹⁹

¹⁷*Ibid.*, hal. 23.

¹⁸M. Jakfar Puteh, dkk., *Islam dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Teoritik dan Aplikatif)*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2014), hal. 73.

¹⁹Koetjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2002), hal. 144.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sebagaimana penelitian awal, penelitian ini telah mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai literatur penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat *Gampong Pande* kecamatan Kuta Raja dan *Gampong Lampeut* kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Aceh, Camat Kuta Raja dan Camat Banda Raya, TKSK Kecamatan Kuta Raja dan Banda Raya, Keuchik *Gampong Pande* dan Keuchik *Gampong Lampeut*, dan masyarakat yang sebagai penerima manfaat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik dalam pengambilan sampel yang berdasarkan ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menyatakan:

“Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tanggung jawab pemerintah setempat. Adapun keberadaan (TKSK) sangat strategis dalam menyukseskan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau penyandang masalah kesejahteraan sosial di

Gampong Pande Kecamatan Kuta Raja dan Gampong Lampeuot Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun faktor pendukung TKSK di Kecamatan Banda Aceh Raya dan Kuta Raja adalah adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan TKSK, adanya data yang diperlukan disetiap *Gampong*, adanya pekerja TKSK yang bekerja dengan maksimal serta perhatian pemerintah yang sangat respon terhadap program tersebut yaitu dengan diberikannya kepada masing-masing TKSK berupa kendaraan dinas dan gaji yang memadai terhadap pegawai TKSK. Sedangkan faktor penghambat adalah disebabkan oleh tenaga TKSK yang terlalu luas jangkauan kerjanya yaitu mencakup suatu Kecamatan masing-masing untuk satu orang TKSK. Demikian juga yang dirasakan oleh TKSK yang ada di Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Banda Raya.”²⁰

Penelitian yang dilakukan Mizan, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif, dimana dalam mendapatkan data peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai dan melakukan observasi terhadap Kelompok Bangkit Bersama, Tari Souvenir, dan Barona, dengan jumlah informan 7 orang yang terdiri dari 1 orang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melalui kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, 3 dari ketua kelompok dan 3 dari perwakilan anggota kelompok. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari Penelitian menyatakan:

“Pola yang digunakan dalam program KUBE FM ini untuk pemberdayaan fakir miskin dengan menggunakan strategi usaha ekonomi produktif

²⁰Izal Bahri. *Partisipasi Masyarakat Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam Mengimplementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.Skripsi*, tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry, 2013, hal. Viii.

(UEP) secara berkelompok melalui bantuan modal usaha, faktor peluang dan hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri (*self determination*) dengan didukung oleh potensi sumberdaya alam maupun manusia. Sedangkan faktor penghambat masih ada paduan operasional program yang tidak sesuai dengan lapangan serta tidak adanya pembinaan khusus oleh pendamping untuk KBS. Secara umum peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KUBE FM masih minim dikarenakan pemberdayaan UEP secara berkelompok tidak berkelanjutan. Akan tetapi UEP dikelola dengan cara mandiri oleh masing-masing anggota.”²¹

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Saridah, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “Strategi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Janda Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Trumon”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif, dimana data yang diperoleh didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian *Fokus Group Discussion* (FGD). Hasil dari penelitian menyatakan:

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai strategi telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi, seperti peningkatan kehidupan ekonomi rumah tangga melalui kegiatan jaminan sosial, bantuan modal usaha. Apabila tidak ada anggaran pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi di dalam DIPA/RKA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, maka diusulkan melalui APBN pada Kementerian Sosial RI di Jakarta. Bantuan yang diberikan Dinas Sosial dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada janda rawan sosial ekonomi yang ada di kecamatan Trumon, dalam bentuk rumah layak huni, modal usaha atau KUBE-FM, mesin jahit, pakaian dan alat bantu bagi penyandang cacat serta bantuan beras miskin (Raskin). Dalam pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi yang ada di kecamatan Trumon, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan menghadapi berbagai kendala, antara lain: Terbatasnya anggaran di dalam program pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi untuk meningkatkan

²¹Mizan. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Skripsi*, tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry, 2012.

kesejahteraan sosial; belum sinergis perencanaan program peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan instansi terkait; kurangnya pemahaman akan pentingnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; kurang partisipasi unsur-unsur masyarakat di dalam penanganan masalah pemberdayaan janda rawan sosial ekonomi.”²²

Penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin, yang menjadi variabelnya adalah Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah masyarakat *Gampong Pandek* kecamatan Kuta Raja dan *Gampong Lampeut* kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Mizan berbeda pada variabel dan objeknya, dimana yang menjadi variabel disini adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah masyarakat yang mengikuti program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM).

Penelitian yang dilakukan oleh Saridah juga berbeda pada variabel dan objeknya, dimana yang menjadi variabel adalah Strategi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Janda Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Trumon, dan objek penelitiannya adalah janda rawan sosial ekonomi.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang

²²Saridah. *Strategi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Janda Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Trumon*. Skripsi, tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry, 2013. Hal. Vii.

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas pertama pada lokasi penelitian, redaksi judul dan rumusan masalah. Dari ketiga perbedaan itulah penulis meneliti topik penelitian tentang “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”.

B. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang berada di bawah tekanan sosial tertentu untuk meraih kembali keseimbangan, kepercayaan dirinya dengan menghilangkan sebab-sebabnya atau kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi institusi-institusi sosial agar bisa diakses oleh anggota masyarakat.²³

Ada beberapa definisi tentang kesejahteraan sosial menurut pendapat para pakar sosiologi yang populer antara lain:

- a. Menurut Midgley kesejahteraan sosial adalah sebagai “*a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapat dapat dipenuhi, serta manakala

²³Mohammad Suud, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal. 1.

manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.²⁴

- b. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesulitan, dan ketentraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.²⁵
- c. Menurut Dubois dan Miley kesejahteraan sosial adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.²⁶

Dari ke tiga pendapat di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas atau kegiatan perubahan kehidupan masyarakat ke arah positif tetapi yang terorganisir yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial (hubungan), serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar norma-norma masyarakat yang ada di lingkungan

²⁴Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), Cet, 1, hal. 104.

²⁵Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Ed I,(Jakarta: Rajawali, 2008), hal. 45.

²⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 146.

sekeliling mereka, pembangunan tersebut bukan hanya fokus pada satu dimensi (ukuran) kesejahteraan ekonomi saja, tetapi mengutamakan dimensi kemanusiaan, serta sosial budaya, masyarakat dan lingkungan alam.

Diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁷

Dalam Undang-undang Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa:

- a. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah.
- c. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang di didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
- d. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial.
- e. Relawan sosial adalah seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

- f. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.
- h. Rehabilitas sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- i. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- j. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.
- k. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.²⁸

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan segala sesuatu hal atau usaha untuk mencapai suatu perubahan kehidupan kearah yang lebih baik bagi individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat yang mengalami penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Atau pencapaian kehidupan masyarakat melalui pemenuhan pendidikan, kesehatan, politik, agama, ekonomi, budaya, hukum, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan tempat usaha serta penyediaan fasilitas-fasilitas umum.

C. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah warga masyarakat yang peduli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memiliki wawasan tentang ilmu kesejahteraan sosial dan komitmen

²⁸*Ibid.*,hal. 2.

terhadap usaha kesejahteraan sosial serta mereka bekerja di wilayah kecamatan. Tugas pokok Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah bersama-sama dengan seluruh kalangan masyarakat lingkungannya dan pemerintah kecamatan, Kabupaten/Kota serta Provinsi melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan membimbing masyarakat baik bidang agama, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan kesehatan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif untuk terlibat langsung dalam usaha kesejahteraan sosial baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.²⁹

Hukum adalah sebagai alat instrument kebijakan yang digunakan oleh pemerintah sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Dengan hukum dapat memfasilitasi, mengatur, atau melarang perilaku tertentu. Hukum juga dapat menciptakan dan mengontrol individu maupun organisasi. Hukum memberikan kerangka kerja bagi pemerintah untuk bertindak. Namun, sebagai besar perinciannya diwujudkan dalam berbagai peraturan yang memberi kewenangan kepada pejabat-pejabat publik untuk melakukan tindakan.³⁰

Jadi yang menjadi landasan hukum program TKSK Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, dan undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Penanganan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 Tentang

²⁹Dinas Sosial Provinsi Aceh..., hal. 3.

³⁰Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik...*, hal. 55.

kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonomi, serta Kepmansos Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial, serta Qanun No. 23 tahun 2004 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Aceh.³¹

Pekerjaan sosial tidak mungkin dipisahkan dari konteks dan arena dimana pekerja sosial beroperasi. Peran pekerja sosial sangat terkait dengan konsepsi mengenai pembangunan lokal, nasional dan pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Apabila pembangunan nasional disederhanakan, maka pekerja sosial dapat dirumuskan kedalam tiga pilar utama yakni, pertumbuhan, perawatan dan pengembangan. Pertumbuhan mengacu bagaimana Negara mencapai pertumbuhan ekonomi (misalnya melalui industrialisasi) guna memperoleh modal finansial bagi kegiatan pembangunan. Sedangkan perawatan dan pengembangan mengarah pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.³²

Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang berusaha untuk menyatukan berbagai bidang ilmu ataupun spesialisasi dari berbagai lapangan praktek. Karena masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakat, para pekerja sosial khususnya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan berkaitan dengan masalah fungsi sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan peranan berdasarkan status yang tenaga

³¹Dinas Sosial Provinsi Aceh..., hal. 2.

³²Edi Suharto, *Pendekatan Makro dan Mikro Dalam Pekerjaan Sosial, Bunga Rampai Kajian Teoritis dan Empiris*, (Bandung: STKS Press, 2008), hal. 1.

kesejahteraan sosial kecamatan milik sesuai dengan harapan lingkungan masyarakat lingkungannya.

Fokus pekerjaan sosial adalah bidang kesejahteraan sosial. Dalam garis besar, pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) menunjuk pada proses terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pemilihan-pemilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan (*real needs* dan *normatif*).³³

Dapat di simpulkan bahwa usaha kesejahteraan sosial harus memperhatikan berbagai unsur dari kehidupan sosial manusia, yaitu individu, kelompok, komunitas, ataupun unit sosial yang lebih luas. Ilmu pekerjaan sosial sendiri pada intinya merupakan himpunan bagian dari ilmu kesejahteraan sosial, atau dapat pula dikatakan bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah perluasan dari ilmu pekerjaan sosial.

Fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai pilar partisipasi masyarakat, artinya TKSK menghubungi atau menjembatani segala aspirasi masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya di bidang penyelenggaraan usaha

³³*Ibid.*, hal. 5.

kesejahteraan sosial (UKS). Peranan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yaitu motivator, dinamisator, fasilitator, dan mediator.³⁴

Motivator yaitu motivasi seluruh elemen masyarakat dan lingkungannya untuk terlibat langsung dalam penanganan permasalahan sosial sebagai akibat dari peristiwa dan terjadinya bencana. Dinamisator yaitu menggerakkan dalam pengertian mengerahkan dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun komunitas masyarakat serta lingkungannya dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Fasilitator yaitu memfasilitasi masyarakat yang sedang mengalami masalah sosial dalam pengertian menyediakan berbagai kemudahan agar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat menjangkau berbagai sumber-sumber yang diperlukan untuk mengatasi permasalahannya. Sedangkan mediator yaitu menghubungkan antara penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan pihak terkait baik pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung pemecahan masalah masyarakat tersebut.³⁵

D. Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Tugas dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) adalah melaksanakan pemetaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di wilayah kecamatan. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial tentang program dan kegiatan serta prosedur mekanisme pelayanan sosial, melakukan pendampingan sosial bagi

³⁴Dinas Sosial Provinsi Aceh..., hal. 6-7.

³⁵*Ibid.*, hal. 7.

kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar, serta mengembangkan jaringan sosial dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun dalam proses memberi rujukan sosial.³⁶

Adapun fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sebagai koordinator, inisiator, motivator, fasilitator, katalisator dan administrator. koordinator sebagaimana dimaksud adalah mengkoordinir unsur-unsur masyarakat seperti: tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah setempat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Inisiator adalah memprakarsai penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Motivator adalah memberi motivasi kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial baik perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menangani masalah sesuai dengan kemampuan sendiri. Sedangkan fungsi fasilitator adalah menyediakan data dan informasi dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, katalisator adalah sebagai penghubung penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan sistem sumber yang ada dilingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan usaha kesejahteraan sosial dan administrator adalah melaksanakan urusan administrasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.³⁷

Adapun yang menjadi sasaran tugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) adalah individu, kelompok maupun masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalam peraturan ini terdapat 23 penyandang masalah

³⁶Kementrian Sosial Republik Indonesia, *NAD Punya TKSK*, (Jakarta: Buletin Sinar, 2007), hal. 16.

³⁷*Ibid.*, hal. 14.

kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran garapan kebijakan kementerian sosial Republik Indonesia beserta Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TKSK yaitu:

“keluarga miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak nakal, pengemis, gelandangan, korban penyalahgunaan narkoba, eks penyakit kronis, anak jalanan, belita terlantar, wanita tuna susila, anak yatim/yatim piatu, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migrant terlantar, masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan bencana, keluarga berumah tidak layak huni, wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam, korban bencana sosial, komunitas adat terpencil dan perintis, pahlawan perjuangan kemerdekaan nasional.”³⁸

E. Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pembinaan TKSK di tingkat provinsi dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Instansi Sosial Provinsi beserta Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. Pembinaan dimaksud berupa fasilitas dan bimbingan teknis TKSK.³⁹

Sedangkan strategi dalam meningkatkan kemampuan TKSK dalam memberi pelayanan sosial maupun pemberdayaan sosial kepada PMKS adalah meningkatkan pembinaan TKSK dengan memberikan pengetahuan tentang pemahaman PMKS beserta kriteria masing-masing PMKS, eksistensi diri sebagai TKSK, Prosedur dan proses kerja, penguatan sikap dan prilaku serta keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial berupa: pemecahan masalah masyarakat, menciptakan jalur hubungan antara penyandang masalah dengan pemilik sumber, (berbagai perkumpulan/asosiasi/organisasi/yayasan/NGO, perguruan tinggi dan dunia usaha, tokoh masyarakat, warga masyarakat,

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia...

³⁹Dinas Sosial Provinsi Aceh..., hal. 8.

penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemerintah kecamatan dan *gampong*), selanjutnya menyediakan informasi mengenai akses sumber kesejahteraan sosial yang tersedia dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari sumber tersebut, mempermudah interaksi antara penyandang masalah dengan pemilik sumber. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta memberikan sumbangan bagi perubahan dan perbaikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kearah yang lebih baik di masa yang akan datang demi kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena dalam lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan tersebut. Membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkungannya dan batasan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti berupaya melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana dan riset yang terlalu luas dan rumit.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) dan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitiannya adalah Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memberikan pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.⁴⁰

Menurut Umar, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-

⁴⁰Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 42.

angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti.⁴¹

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah pencarian data dilapangan, karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.⁴² Serta disebut penelitian lapangan, karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.⁴³

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

Metode deskriptif adalah penilaian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan dari objek yang diteliti.⁴⁴

⁴¹Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 36.

⁴²Nasir Budiman, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet: I (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), hal. 23.

⁴³Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 9.

⁴⁴Etta Mamang Sengaji, Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, ed 1 (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 21.

Menurut Sumardi Suryabrata sebagaimana yang dikutip oleh Soejono menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat.⁴⁵

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.⁴⁶ Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian atau bagian dari populasi untuk mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang sumber datanya dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang akan diteliti.⁴⁷

Adapun kriteria informan yang dimaksudkan oleh peneliti disini adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah, situasi, kondisi masyarakat kecamatan Tangan-Tangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 12 orang sebagai informan yang terdiri dari Keuchik *Gampong* atau Kepala desa di kecamatan (3) tiga orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1 (satu) orang, dan masyarakat penerima manfaat 8 (delapan) orang yang

⁴⁵Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. 2, (Jakarta:Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hal. 21.

⁴⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 111.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 9.

terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki, dan 5 (lima) orang perempuan yang mewakili penerima manfaat Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan yaitu masalah Anak Dengan Kecacatan (ADK), Lanjut Usia Terlantar (LUT), Penyandang Disabilitas (PD), Pengemis, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Fakir Miskin (FM), Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, dan Keluarga Rumah Berumah Tidak Layak Huni (RTLH).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Peneliti harus menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis, dan perbuatan, untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁸ Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁴⁹ Teknik

⁴⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), hal. 62.

⁴⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian (Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar)*, Cet, 6 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),hal, 70.

ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang menjadi sampel penelitian. Ketika teknik komunikasi tidak memungkinkan, maka observasi itu sangat bermanfaat. Di samping itu juga teknik ini sekaligus dapat mengecek langsung kebenaran setiap data yang disampaikan oleh para responden ketika diskusi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang, untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian bersama informan.⁵⁰ Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁵¹

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan metode wawancara atau diskusi mendalam. Wawancara atau diskusi mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang peran tanaga kesejahteraan sosial dalam memfasilitasi masyarakat penyandang masalah

⁵⁰Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 133.

⁵¹Burhan Bungin, (ed), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 143.

kesejahteraan sosial (PMKS). Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Peneliti melakukan verifikasi data tidak hanya percaya dengan pernyataan informan tetapi juga perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan atau dari informan yang satu ke informan yang lain. Wawancara juga sebagai bahan untuk mendukung atau penambahan data dari proses observasi yang terdiri dari dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.⁵²

Wawancara atau diskusi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data, maka hal ini dipertanyakan pada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu dengan cara mengambil gambar dengan kamera dan alat rekam sebagai alat untuk wawancara.

E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan

⁵²Husaini Usman danPurnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, hal, 57.

ilmiah. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi tentang fenomena (situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka maupun yang hanya bisa dirasakan.⁵³

Analisis data kualitatif dalam buku Lexy J Moleong menurut Seiddel prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat iktisar, dan membuat indeksinya.
3. Berfikir dengan jalan membuat agar katagori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.⁵⁴

Menurut N.K Malhotra dalam buku Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (*Metodelogi penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*), menjelaskan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

⁵³Imam Suprayoga, Tabroni, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 133.

⁵⁴Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 283.

Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan. Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman data, penggolongan data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu, pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini dapat dilakukan melalui: seleksi data yang ketat, pembuatan ringkasan, dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik, dan bagan.⁵⁵

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Adapun tehnik analisis data yang digunakan oleh penulis disini adalah deduktif-induktif.

Dalam analisis data kualitatif terdapat dua metode dalam penarikan kesimpulan (generalisasi), yaitu metode induktif dan metode deduktif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode induktif dalam

⁵⁵Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian...*, hal, 200.

melakukan penarikan kesimpulan. Metode induktif adalah cara analisis berdasarkan contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta yang diuraikan menjadi suatu kesimpulan umum atau generalisasi.

Data yang sudah diperoleh dipilah atau diorganisasikan sesuai dengan pertanyaan dan permasalahan masing-masing. Yang bertujuan untuk menggambarkan secara aktual dan teratur tentang masalah penelitian sesuai data atau fakta, yang didapat dari lapangan yaitu pada masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Adapun langkah-langkah yang peneliti gunakan adalah:

- a. Mengumpulkan atau merangkum data yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak untuk dianalisis.
- b. Menafsirkan data yang diperoleh.
- c. Menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Tangan-Tangan merupakan daerah induk pemekaran dari Kecamatan Setia. Terdiri dari 2 mukim yaitu *Tangan-Tangan Rayeuk* dan *Bineh Krueng*, 15 *Gampong* serta 45 dusun. Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo luwes
- Sebelah Timur : Kecamatan Manggeng
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kecamatan Setia

Kecamatan Tangan-Tangan menempati luas wilayah sekitar 7,01% (132,92 km²) dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang jalan nasional Meulaboh-Tapaktuan. Hanya sedikit yang berdomisili di daerah perbukitan.⁵⁶

Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan di level kecamatan dan *gampong*, maka dipilihlah *gampong* Tanjung Bungamenjadi ibukota kecamatan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas efisiensi berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Dengan jumlah penduduknya

⁵⁶BPS, *Kecamatan Tangan Tangan Dalam Angka 2016*, Kabupaten Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2016.

berdasarkan hasil dari Proyeksi Penduduk BPS Tahun 2015 berjumlah sekitar 12.825 jiwa dengan rincian 6.265 laki-laki (48.84 %) dan 6.560 (51.16%) perempuan.⁵⁷

2. *Gampong* di Kecamatan Tangan-Tangan dan Kepala*Gampong*

Adapun jumlah *gampong* yang ada di kecamatan Tangan-Tangan adalah sebanyak 15 *gampong* dengan namanya dan nama pemimpin *gampong* serta nama pimpinan kepala dusun di kecamatan Tangan-Tangan adalah sebagai berikut:⁵⁸

Tabel 4.1. *Gampong* di Kecamatan Tangan-Tangan Beserta Pimpinannya

No	Nama <i>Gampong</i>	Nama Pimpinan <i>Gampong</i>	Dusun	Nama Pimpinan Dusun
1	Padang Bakjok	M. Saman	Bahagia	Yusri
			Sentosa	Murhaban
			Abadi	Ilyas Abadi
2	Suak Nibong	Nurdin	Sedar	Ramli B
			Kru Seumangat	Amir Bahar
			Yaman	Basri, RC
3	Drien Kipah	Idrus	Sempurna	Salman
			Raja Sipacak	Abd. Manaf
			Teungoh	Zilbaidi
4	Bineh Krueng	Edwardo	Saadah	Nyak Mad
			Deyah Puteh	Racidin Nyak
			Jamaah Amaliah	Mukhtaruddin
5	Drien Jalo	Pardianto	Sepakat	Saiful AS
			Istiqamah	Hasanuddin
			Sejahtera	Tarmizi
6	Padang Kawa	Tarmizi	Bahagia	M. Laili
			Permata	Fahkrudin
			Sejahtera	Fazli
7	Mesjid	Hasanuddin L	Simpang Tiga	Ramli B
			Lampoh Ue	Anas

⁵⁷*Ibid.*, hal. 3-18.

⁵⁸*Ibid.*, hal. 20-21.

			Ujoeng Blang	Nasruddin
8	Adan	Wahidi	Bukit Hijau	Muhammad Jasa
			Pertemuan	M. Hatta

	Nama <i>Gampong</i>	Nama Pimpinan <i>Gampong</i>	Dusun	Nama Pimpinan Dusun
			Cempaka	Hasan Us
9	ante Geulumpang	Yusli	Permata	Mahdi, Is
			Sejahtera	Abdullah. Ak
			Milia	Mahmud. Id
10	Gunung Cut	Sanusi	Mata Ie	Daimi
			Mutiara	Amiruddin
			Serangkai	M. Jamin
11	dang Bak Jeumpa	Herman	Panglima Ahmad	Cut Rahman
			Jeumpa Barat	Azwar Hamid
			Jeumpa Utara	Saridin Monalisa
12	Blang Padang	Marta Dinata	Timur Jati	Kaharuddin
			Keuramat	Arken
			Padang Setui	Radali
13	Suak Labu	Damai Yuti	Nga Meucob	Ismail K
			Cemara Putro	Zulkifli D
			Paya Tambu	Baharuddin M
14	Kuta Bak Drien	Syarkani	Mata Ie	Jusmadi J
			Sinar Baru	Abd. Gani
			Purnama	Syamsuddin Us
15	Ie Lhop	T. Safrizal	Harapan	Ilyas Amin
			Mata Ie	Amiruddin, DH
			Pendidikan	Safruddin

Sumber: Data BPS, Kecamatan Tangan-Tangan Dalam Angka 2016.⁵⁹

Berdasarkan data ditabel 4.1 dapat kita lihat bahwa di kecamatan Tangan-Tangan terdapat 15 *gampong* yang terdiri 45 dusun. Di setiap *gampong* dipimpin

⁵⁹Dana BPS, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

oleh satu orang kepala *gampong* dan tiga orang kepala dusun di setiap *gampongnya*.

3. Mata Pencarian

Pada umumnya peternak bukanlah mata pencaharian utama, tetapi lebih kepada pekerjaan sampingan. Tercatat sebanyak 925 ekor kerbau, 139 ekor sapi, 1.266 kambing atau domba dan 33.027 ekor unggas. Pertanian dan perkebunan masih memegang peranan penting dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 terdapat 108 kelompok tani padi atau palawija di kecamatan Tangan-Tangan. *Gampong Gunong Cut* dan *Ie Lhop* merupakan 2 *gampong* yang mempunyai kelompok tani padi atau palawija. Terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 12 kelompok tani atau palawija. Kelompok tani perkebunan sebanyak 17 kelompok di kecamatan Tangan-Tangan. Sedangkan kelompok tani perternakan dan perikanan di kecamatan Tangan-Tangan sebanyak 5 dan 6 kelompok.

Pada umumnya industri belum dapat berkembang dengan baik di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat Daya pada khususnya. Sebagian besar masih bersifat industri rumah tangga. Terdapat sebanyak 35 unit pembuatan border atau

kasab di wilayah Tangan-Tangan. Sedangkan kilang padi terdapat 21 unit yang tersebar di sekitar areal pertanian.⁶⁰

Adapun populasi ternak dan jenisnya dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Kecamatan Tangan-Tangan Tahun 2016

<i>Gampong</i>		Ternak (Ekor)			
		Kerbau	Sapi	Kambing/ Domba	Unggas
1	Padang Bakjok	53	2	71	1529
2	Suak Nibong	56	-	64	2238
3	Drien Kipah	70	-	107	1780
4	Bineh Krueng	91	10	97	2859
5	Drien Jalo	60	-	64	1832
6	Padang Kawa	60	65	19	2041
7	Mesjid	17	-	27	875
8	Adan	106	-	186	2780
9	Pante Geulumpang	20	-	48	1394
10	Gunung Cut	47	53	86	3125
11	Padang Bak Jeumpa	63	9	194	2548
12	Blang Padang	97	-	87	3155
13	Suak Labu	46	-	194	2831
14	Kuta Bak Drien	74	-	72	2116
15	Ie Lhop	65	-	40	1924
Jumlah		925	139	1266	33027

Sumber: Data BPS, Kecamatan Tangan Tangan Dalam Angka 2016.⁶¹

⁶⁰Data Kecamatan Tangan-Tangan Dalam Angka 2016.

⁶¹Data BPS, Kecamatan Tangan Tangan Dalam Angka 2016.

Populasi ternak menurut jenisnya di kecamatan Tangan-Tangan tahun 2016 telah terlihat jelas bahwa usaha sampingan masyarakat dominan berternak.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan hasil observasi bahwa keadaan sosial masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan hubungan sosialnya antara satu dengan yang lainnya masih terlihat sangat erat, terutama pada orang tua. Kebersamaan terlihat pada masyarakat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, ketika akan menanam padi masyarakat selalu mengadakan acara kenduri, dalam acara tertentu misalnya seperti acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw, kenduri sawah (*Blang*) dan acara perkawinan maupun acara lain mereka semua akan ikut serta. Dalam bidang keagamaan mereka melaksanakan shalat berjamaah di Masjid, serta Takziah ketempat orang meninggal.

Kegiatan keagamaan lainnya juga berjalan seperti wirid yasin yang diadakan seminggu sekali dan pengajian khusus pada malam Minggu di Masjid oleh tengku Mansur. Serta pemuda pemudi juga ikut pengajian bersama masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan walaupun hanya sebahagian mereka yang ikut pengajian. Ketika salah seorang masyarakat meninggal dunia masyarakat membaca yasin dari malam pertama sampai malam ketujuh berturut-turut.

Pemuda dan pemudi juga ikut berpartisipasi membantu masyarakat yang tertimpa musibah seperti ikut membantu menyumbangkan tenaga semampunya

dalam bekerja pada kegiatan kenduri berlangsung, begitu juga dengan berbagai kegiatan atau acara yang ada dalam masyarakat seperti pesta pernikahan, sunat Rasul dan dalam berbagai acara lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari ibu-ibu mengenakan pakaian yang menutup aurat serta menggunakan jilbab jika keluar rumah, begitu juga dengan anak-anak gadisnya. Rasa kepedulian masyarakat terhadap agama sangat kuat sehingga saling mengingatkan dibidang agama dalam berbagai hal.⁶²

5. Karakteristik *Gampong*di Kecamatan Tangan-Tangan

Tabel 4.3. Karakteristik *Gampong*di Kecamatan Tangan-Tangan.⁶³

No	Nama <i>Gampong</i>	Kriteria	Kemampuan
1	Padang Bakjok	Miskin	Swakarya
2	Suak Nibong	Miskin	Swakarya
3	Drien Kipah	Miskin	Swakarya
4	Bineh Krueng	Bukan Miskin	Swasembada
5	Drien Jalo	Miskin	Swasembada
6	Padang Kawa	Miskin	Swakarya
7	Mesjid	Miskin	Swakarya
8	Adan	Miskin	Swasembada
9	Pante Geulumpang	Miskin	Swakarya
10	Gunung Cut	Bukan Miskin	Swasembada
11	Padang Bak Jeumpa	Bukan Miskin	Swakarya
12	Blang Padang	Miskin	Swakarya
13	Suak Labu	Miskin	Swakarya
14	Kuta Bak Drien	Bukan Miskin	Swakarya

⁶²Hasil Observasi Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

⁶³BPS, *Kecamatan Tangan Tangan Dalam Angka 2016...*, hal. 18.

15	Ie Lhop	Bukan Miskin	Swakarya
----	---------	--------------	----------

Sumber: Data BPS, Kecamatan Tangan-Tangan Dalam Angka 2016.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa hampir keseluruhan *gampong* yang ada di kecamatan Tangan-Tangan, mayoritasnya adalah masyarakat miskin. Hal ini terlihat jelas dari tabel diatas dimana 10 *gampong* dari 15 *gampong* adalah *gampong* yang masuk kedalam kelompok miskin. Sedangkan 5 *gampong* sisanya adalah kelompok bukan miskin.

Hasil wawancara dengan bapak Nasrudin mengatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan yang diberikan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di kecamatan Tangan-Tangan. Dalam hal ini masyarakat khususnya tidak bisa mengatakan bahwa masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanyalah ada satu orang dan harus mengayomi 15 (lima belas) *gampong* yang ada di kecamatan Tangan-Tangan. Hal ini sudah barang tentu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak akan bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagai motivator (pendorong), dinamisator (penggerak), penggagas awal atau perintis (inovator), dan pemantau atau penilai (evaluator) penyelenggara kesejahteraan sosial secara maksimal di lingkungan kecamatan Tangan-Tangan. Untuk jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan seharusnya dinas sosial dapat menambah jumlahnya lagi. Bapak Nasrudin juga

menjelaskan bahwa sejauh ini belum melihat adanya kerjasama yang baik antarpihak pemerintah, LSM dan pihak-pihak dunia usaha lainnya.⁶⁴

Selanjutnya bapak Lukman juga menjelaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan dalam menangani masalah kemiskinan di kecamatan Tangan-Tangan. Hal ini terlihat dari minimnya informasi-informasi yang diberikan berkaitan dengan program dari dinas sosial guna memberantas kemiskinan yang sifatnya untuk memotivasi masyarakat miskin sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.

Kemudian bapak Lukman juga mengatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum mampu menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) seharusnya melakukan je-jaring dengan organisasi sosial yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya agar klien mendapat pelayanan yang sebaik-baik dan sebenarnya. Sehingga dengan demikian masyarakat langsung dihubungkan dengan segenap potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan ini sudah barang tentu dapat mencapai tujuan dan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai motivator (pendorong), dinamisator (penggerak), penggagas awal atau perintis (inovator), dan pemantau atau penilai (evaluator) penyelenggara kesejahteraan sosial di lingkungan kecamatan Tangan-Tangan.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrudin, Masyarakat Fakir Miskin, Pada Tanggal 18 Agustus 2016.

Berdasarkan uraiannya juga dijelaskan bahwa sampai saat ini kondisi ekonomimasyarakat di kecamatan belum mengalami perubahan setelah mendapat bimbingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).⁶⁵

Kemudian ibu Maimunah juga berpendapat bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum menjalankan perannya dan sangat jarang memantau kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh dinas sosial sehingga dapat kita simpulkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan dalam menangani masalah kemiskinan dilingkungan kecamatan Tangan-Tangan.

Dia juga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan sama saja tidak adanya perubahan baik itu setelah mendapat bimbingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun belum. Mengingat masih banyaknya jumlah fakir miskin dan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di *gampong-gampong* tersebut.⁶⁶

Program yang dilakukan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diharapkan membawa dampak yang baik dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Marini dimana menjelaskan bahwa:

Menurut Marini bahwa belum ada kegiatan atau program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang di laksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga miskin contohnya saya dan keluarga dimana sampai saat ini saya belum pernah menerima sosialisasi atau menerima bimbinganyang datang dari Tenaga

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Lukman, Masyarakat Fakir Miskin, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah, Masyarakat Fakir Miskin, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi saya dan keluarga.⁶⁷

Kemudian Nur Adi juga menjelaskan bahwa kegiatan atau program Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) sangat sedikit diarahkan kepada bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi keluarga miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sehingga ini menyebabkan keterbatasan informasi atau cara-cara meningkatkan ekonomi keluarga miskin. Dia juga menjelaskan bahwa salah satu faktor kenapa masih banyaknya jumlah kemiskinan yang ada di kecamatan Tangan-Tangan tersebut dikarenakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum diberikan kuasa penuh dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam proses pembinaan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima pembinaan, sedangkan proses pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial. Dinas sosial seharusnya memberikan wewenang penuh kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan pembinaan. Karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah tenaga kesejahteraan sosial yang sudah melihat jelas bagaimana kondisi kemiskinan masyarakat dan mengetahui langkah apa yang dapat diambil untuk dapat mengatasi kemiskinan di kecamatan Tangan-Tangan tersebut.⁶⁸

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Marini, Masyarakat Fakir Miskin, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Nur Adi, Masyarakat Fakir Miskin, Pada Tanggal 18 Agustus 2016.

Kemudian dia juga menjelaskan bahwa dengan memberikan akses yang lebih kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) akan sangat membantu mereka dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai motivator (pendorong), dinamisator (penggerak), penggagas awal atau perintis (inovator), dan pemantau atau penilai (evaluator) penyelenggara kesejahteraan sosial di lingkungan kecamatan Tangan-Tangan.⁶⁹

Menurut hasil wawancara dengan Asyiah menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan sosial guna mengatasimasalah kemiskinan dikecamatan Tangan-Tangan tidak dilakukan secara rutin dan tidak sesuai karena kehadiran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ke *gampong-gampong* bisa dibilang sangat jarang sehingga menyebabkan bimbingan atau penyuluhan yang diberikan sebelumnya terlupakan begitu saja dan setiap bimbingan atau penyuluhan yang dilakukan selanjutnya selalu dengan materi yang berbeda. Berdasarkan info yang diterima Asyiah juga menjelaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten Aceh Barat Daya. Akses yang diberikan hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja, kemudian diserahkan dan ditindak lanjuti oleh Dinas sosial Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Ibuk Asyiah, Masyarakat Fakir Miskin, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

Selanjutnya Marini menjelaskan bahwa keterbatasan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan sangat berkaitan dengan keterbatasan orang dan waktu yang dimiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dimana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di kecamatan Tangan-Tangan hanyalah satu orang. Sehingga kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan sosial guna mengatasi masalah kemiskinan di Kecamatan Tangan-Tangan belum terealisasi dengan benar.⁷⁰

Marini juga mengaku bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum mampu menjalankan tugasnya dalam menangani masalah kemiskinan di Kecamatan Tangan-Tangan karena untuk mengatasi masalah kemiskinan membutuhkan kerjasama di berbagai pihak, dan itu semua tidak terlihat dari program-program yang akan atau yang sedang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dimana penyalinan kerjasama dan jaringan kerja dengan segenap potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak dunia usaha lainnya belum terlihat.

Kemudian Marini juga menjelaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya atau fungsinya sebagai motivator (pendorong), dinamisator (penggerak), penggagas awal atau perintis (inovator), dan pemantau atau penilai (evaluator) penyelenggara kesejahteraan sosial di lingkungan kecamatan Tangan-Tangan belum dilakukan secara

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Marini, Masyarakat Fakir Miskin, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

menyeluruh. Hal ini terlihat jelas dimana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum mampu menggerakkan atau memberikan ide dan gagasan tentang kegiatan apa yang harus dilakukan guna untuk dapat keluar dari garis kemiskinan. Untuk dapat keluar dari garis kemiskinan tersebut seharusnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) harus benar-benar menjalankan perannya serta fungsinya sebagai utusan yang ditunjukkan atau diberi amanah untuk memberikan bimbingan dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Tetapi sayangnya akibat fungsi dan perannya belum dijalankan secara maksimal menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan belum mengalami perubahan sampai saat ini walaupun ada sebahagian masyarakat sudah mendapatkan bimbingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).⁷¹

Kemudian dijelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat *gampong* Padang Kawa sama saja tidak adanya perubahan baik itu setelah mendapat bimbingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun belum. Mengingat masih banyaknya jumlah fakir miskin yang ada di *gampong-gampong* tersebut.⁷² Selanjutnya berdasarkan data dokumentasi yang diterima peneliti dari data dokumentasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Tangan-Tangan tahun 2016 ditemukan bahwa kondisi kemiskinan di kecamatan Tangan-Tangan adalah sebagai berikut:⁷³

⁷¹Hasil Wawancara dengan Ibu Marini, Masyarakat Fakir Miskin, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

⁷²Hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah, Masyarakat Penerima Manfaat *Gampong* Padang Kawa, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

⁷³Hasil Dari Data Dokumentasi TKSK Kecamatan Tangan-Tangan Tahun 2016.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Tahun 2015-2016 di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Nama <i>Gampong</i>	Tahun	
		2015	2016
1	Padang Bakjok	100 Orang	112 Orang
2	Suak Nibong	211 Orang	220 Orang
3	Drien Kipah	220 Orang	240 Orang
4	Bineh Krueng	120 Orang	160 Orang
5	Drien Jalo	221 Orang	220 Orang
6	Padang Kawa	225 Orang	230 Orang
7	Mesjid	126 Orang	1801 Orang
8	Adan	220 Orang	240 Orang
9	Pante Geulumpang	245 Orang	260 Orang
10	Gunung Cut	270 Orang	300 Orang
11	Padang Bak Jeumpa	270 Orang	280 Orang
12	Blang Padang	220 Orang	220 Orang
13	Suak Labu	260 Orang	280 Orang
14	Kuta Bak Drien	213 Orang	230 Orang
15	Ie Lhop	260 Orang	260 Orang

Sumber: Data BPS, Kecamatan Tangan-Tangan Dalam Angka 2016.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa, hampir seluruh *gampong* mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin di kecamatan Tangan-Tangan. Walaupun beberapa *gampong* tersebut sudah pernah menerima bantuan dalam bidang pengembangan usaha dari dinas sosial sehingga dapat kita simpulkan bahwa masalah kemiskinan dikecamatan tersebut belum bisa teratasi. Terkait masalah pengurangan atau penurunan jumlah penduduk miskin harus melibatkan semua pihak, dan hal ini juga dibebankan pada dinas sosial semata.

Kemudian Herman juga menjelaskan bahwa salah satu faktor kenapa masih banyaknya jumlah kemiskinan yang ada di *gampong* tersebut dikarenakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum diberikan kuasa

penuh dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam proses pembinaan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima pembinaan, sedangkan proses pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh dinas sosial. Dinas sosial seharusnya memberikan wewenang penuh kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan pembinaan. Karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah tenaga kesejahteraan sosial yang sudah melihat jelas bagaimana kondisi kemiskinan masyarakat dan mengetahui langkah apa yang dapat diambil untuk dapat mengatasi kemiskinan di kecamatan Tangan-Tangan tersebut.

Kemudian dia juga menjelaskan bahwa dengan memberikan akses yang lebih kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) akan sangat membantu mereka dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai motivator (pendorong), dinamisator (penggerak), penggagas awal atau perintis (inovator), dan pemantau atau penilai (evaluator) penyelenggara kesejahteraan sosial di lingkungan Kecamatan Tangan-Tangan.⁷⁴

Kemudian Herman juga menjelaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya atau fungsinya sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat demi kesejahteraan sosial di lingkungan Kecamatan Tangan-Tangan belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini terlihat jelas dimana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum mampu

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, Geuchik *Gampong* Padang Bak Jeumpa, Pada Tanggal 20 Agustus 2016.

menggerakkan atau memberikan ide dan gagasan tentang kegiatan apa yang harus dilakukan guna untuk dapat keluar dari garis kemiskinan.

Untuk dapat keluar dari garis kemiskinan tersebut seharusnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) harus benar-benar menjalankan perannya serta fungsinya sebagai utusan yang ditunjukkan atau diberiamanahuntuk memberikan bimbingan dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Tetapi sayangnya akibat fungsi dan perannya belum dijalankan secara maksimal menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan belum mengalami perubahan sampai saat ini walaupun ada sebahagian masyarakat sudah mendapatkan bimbingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).⁷⁵

Sanusi menjelaskan bahwa modal usaha hanya diberikan oleh dinas sosial. Sedangkan bantuan dari pihak lain selain itu tidak pernah ada di *gampong* Gunung Cut. Bantuan yang diberikan Dinas Sosial adalah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, dan bantuan tersebut juga tidak diberikan secara merata sehingga ada sebahagian masyarakat atau kelompok kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena harus mencari modal sendiri.⁷⁶

Selanjutnya Herman jugamenjelaskan hal yang sama dimana masyarakat di *gampong* Padang Bak Jeumpa sangat sedikit menerima bantuan dari dinas

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, Masyarakat Penerima Manfaat *Gampong* Padang Bak Jeumpa, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Sanusi, Geuchik *Gampong* Gunung Cut, Pada Tanggal 20 Agustus 2016.

sosial. Sehingga banyak dari masyarakat sulit untuk keluar dari garis kemiskinan.⁷⁷ Dia juga menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan terhenti di tengah jalan. Hal ini menyebabkan sebahagian kelompok usaha ada yang harus mengakhiri usaha mereka.

Menurut Maimunah menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sudah seharusnya memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjadi pendamping sosial. Kerana mereka akan membimbing dan juga membina kelompok-kelompok usaha yang dibinanya. Tetapi sejauh pengamatan peneliti di *gampong* Padang Kawa bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masih perlu mengikuti pembinaan oleh dinas sosial. Karena sejauh ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) masih belum tanggap dengan permasalahan *gampong* yang terjadi, khususnya masalah-masalah yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).⁷⁸

Sanusi juga menjelaskan bahwa untuk dapat menjalankan perannya secara maksimal, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) harus sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Sehingga bisa berkontribusi secara maksimal untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).⁷⁹

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, Geuchik *Gampong* Padang Bak Jeumpa, Pada Tanggal 20 Agustus 2016.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Maimunah, Masyarakat Penerima Manfaat *Gampong* Padang Kawa, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sanusi, Geuchik *Gampong* Gunung Cut, Pada Tanggal 20 Agustus 2016.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya sebagai kepanjangan tangan atau wakil dari dinas sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mendapat perlakuan bahwa kurangnya pengakuan dari pemerintah setempat terhadap kewenangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai wakil dinas sosial Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, yang menjadi faktor penghambat anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya adalah disebabkan luasnya jangkauan kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mencakup seluruh *gampong* yang ada di kecamatan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi dinas sosial untuk mempertimbangkan jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.⁸⁰ Selanjutnya Mariani juga menjelaskan bahwa yang menjadi penghambat adalah kurangnya bantuan untuk membuka usaha.⁸¹ Sedangkan Tarmizi menjelaskan bahwa masyarakat selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usaha.⁸²

Herman menjelaskan bahwa faktor pendukung bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya memfasilitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang salah satunya adalah fakir miskin terletak pada modal usaha. Modal penentuan utama bagi masyarakat untuk bisa

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Lukman, Masyarakat Penerima Manfaat *Gampong* Gunung Cut, Pada Tanggal 21 Agustus 2016.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Ibu Mariani, Masyarakat Penerima Manfaat *Gampong* Padang Bak Jeumpa, Pada Tanggal 19 Agustus 2016.

⁸²Hasil Wawancara dengan Bapak Tarmizi, Geuchik *Gampong* Padang Kawa, Pada Tanggal 21 Agustus 2016.

menjalankan usahanya. Selain itu, sikap yang ditunjukkan masyarakat terhadap modal usaha tersebut. Apakah modal tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk modal atau dimanfaatkan untuk keperluan lain.⁸³

Kenyataannya bahwa dari hasil observasi peneliti di *gampong* Padang Bak Jeumpaditemukan bahwa Marini tidak memiliki usaha apa-apa yang bisa dikembangkan. Setelah diamati lebih jauh dan berdasarkan informasi yang diterima dari Geuchik *gampong* Padang Bak Jeumpa bahwa Marini sebelumnya pernah menerima bantuan dari dinas sosial untuk mengembangkan usaha dibidang ternak bebek. Tetapi realitanya usaha tersebut tidak dijalankan sebagaimana semestinya.⁸⁴

Semuanya dimanfaatkan untuk konsumtif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil pengamatan peneliti, disekitaran rumah Marini hanya terdapat kandang bebek yang rencananya akan di jadikan kandang bebek usaha ternakberdasarkan proposal permohonan bantuan yang diajukan ke Dinas Sosial. Tetapi sayangnya kandang tersebut belum terisi satu ekor bebek pun sedangkan modal sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga.⁸⁵

Selanjutnya upaya yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya memfasilitasi fakir miskin adalah menumbuh kembangkan peran serta individu-individu untuk ikut

⁸³Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, Geuchik *Gampong* Padang Bak Jeumpa, Pada Tanggal 21 Agustus 2016.

⁸⁴Data Dokumentasi TKSK Kecamatan Tangan-Tangan Tahun 2016.

⁸⁵Data Observasi Peneliti di Lapangan, (*Gampong* Pangang Bak Jeumpa, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya), Pada Tanggal 17 Agustus 2016.

membantu mengatasi tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan Tangan-Tangan yang kemudian didukung oleh berbagai pihak.⁸⁶

Adapun hasil observasi di *gampong* Gunung Cut, ditemukan bahwa pernah usaha yang sempat berjalan di *gampong* tersebut yaitu usaha ternak kambing. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti disekitaran rumah Nur Nadi bahwa masih ada kandang kambing yang masih berdiri di dekat perkarangan rumahnya. Kandang tersebut merupakan hasil dari usaha bersama yang pernah dijalankan kelompok masyarakat *gampong* Gunung Cut.

Pada saat itu jumlah anggota usaha ternak kambing itu berjumlah 10 orang dengan jumlah kambing yang akan dikembangkan adalah sebanyak 8 ekor kambing yang dimodali oleh Dinas sosial. Tetapi kenyataannya sekarang berdasarkan pengamatan peneliti usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi sebagaimana semestinya, dan dikandang tersebut tidak terlihat satu ekor kambingpun didalamnya. Hal ini terjadi karena kesalahan persepsi pada masyarakat terhadap bantuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah diberikan pemerintah.

Sebagian mereka masih mengartikan pemberian dana bagi penguatan modal KUBE adalah sebuah proyek dimana setiap pemberian pemerintah selalu diartikan sebagai hibah murni. Dikarenakan persepsi itu pengembangan ternak

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Sanusi, Geuchik *Gampong* Gunung Cut, Pada Tanggal 21 Agustus 2016.

kambing tidak dilanjutkan dan hanya dijadikan sebatas program permohonan modal dari pemerintahan.⁸⁷

Kemudian Tarmizi menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya memfasilitasi fakir miskin yaitu dengan cara membantu masyarakat miskin untuk mengajukan modal usaha ke Dinas Sosial atau dengan kata lain memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan modal usaha untuk membuka usaha.⁸⁸

Selanjutnya Herman juga menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya memfasilitasi fakir miskin adalah membantu masyarakat dalam mengelola bantuan yang diberikan pemerintah. Mengingat bahwa masyarakat banyak yang kurang mengerti tentang menjalankan usaha.⁸⁹

B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang adanya suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat

⁸⁷Data Observasi Peneliti di Lapangan, (*Gampong* Pangang Gunung Cut, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya), Pada Tanggal 18 Agustus 2016.

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Tarmizi, Geuchik *Gampong* Padang Kawa, Pada Tanggal 21 Agustus 2016.

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, Geuchik *Gampong* Padang Bak Jeumpa, Pada Tanggal 20 Agustus 2016.

terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Adapun jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan dalam 15 (lima belas) *gampong*, di kecamatan Tangan-Tangan terdapat masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hampir semua sama masalah yang di hadapi oleh masyarakat *gampong* di kecamatan Tangan-Tangan cenderung masyarakat tergolong kedalam Fakir Miskin (FM).

Kemiskinan lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok anggota masyarakat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.⁹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan pada hakekatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Berikut ini akan dijelaskan secara terperinci definisi tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

Hasil wawancara dengan Herda Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan Tangan-Tangan mengatakan bahwa:

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah wanita dewasa yang belum atau tidak menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam arti pencari nafkah tunggal, atau istri yang ditinggal suaminya tanpa batas waktu, tanpa diberi nafkah. Usia Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dari 16-54 tahun, tidak memiliki keterampilan kerja atau memiliki keterampilan tetapi kurang bermanfaat. Sedangkan wanita muda yang tinggal di daerah rawan sosial usia 16-29 tahun. Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh dinas sosial berupa pemberian modal usaha jualan kios hal ini merupakan suatu upaya dalam mensejahterakan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di kecamatan Tangan-tangan kabupaten Aceh Barat Daya.⁹¹

Herda juga menjelaskan bahwa keluarga fakir miskin yang ada di Kecamatan Tangan-Tangan di kabupaten Aceh Barat Daya adalah:

Fakir Miskin yaitu keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencarian yang tetap dan tidak mempunyai keterampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Ciri-ciri keluarga miskin antara lain usia 18- < 60 tahun, tidak pernah membeli pakaian dalam setahun atau hanya pada waktu lebaran, penggunaan air bersih masih menggunakan air sumur, sungai, mata air dan air hujan, pengeluaran rumah tangga lebih besar dari pada pendapatan, kepemilikan rumah masih menyewa atau kontrak, menumpang atau milik sendiri, tetapi tidak layak huni, dinding rumah masih menggunakan bambu, lantai rumah masih tanah atau pasir, tidak mempunyai sarana tempat buang air besar (jamban/kakus) atau menggunakan toilet umum, sumber penerangan masih menggunakan petromak atau listrik bersama, pada umumnya jumlah anggota rumah tangga masih banyak (4 sampai dengan 6 orang bahkan lebih), tidak mempunyai mata pencarian yang tetap atau mempunyai mata pencarian, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, pelayanan kesehatan yang digunakan seperti mantra, bidan dan puskesmas, dan pendidikan kepala rumah tangga masih rendah seperti tidak sekolah, tidak tamat SD dan tamat SD.⁹²

⁹¹Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

⁹²Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

Herda juga menjelaskan bahwa kenyataan kehidupan para Lanjut Usia Terlantar (LUT) di kecamatan Tangan-Tangan adalah seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih, karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmini maupun sosial, tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan yang layak, dan tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan kondisi para lanjut usia karena tidak dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari secara baik. Para lanjut usia sangat mengharapkan pertolongan atau bantuan dari pemerintah setempat demi kelangsungan hidupnya.⁹³

Sedangkan Anak Dengan Kecacatannya (ADK) di kecamatan Tangan-Tangan adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental (ganda), juga merupakan berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat di ukur/dilihat, karena adanya kehilangan/kelainan dari bagian tubuh/organ seseorang. Anak cacat di kecamatan Tangan-Tangan hampir seluruhnya tidak bersekolah tidak seperti anak normal lainnya, hal ini merupakan salah satu faktor ekonomi sebagai penghambat dalam pendidikan anak-anak cacat dikecamatan Tangan-Tangan juga merupakan

⁹³Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

faktor keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak dengan kecacatannya, adapun usia anak dengan kecacatannya adalah usia dari 0-18 tahun.

Herda juga mengatakan bahwa Anak Yatim/Piatu adalah anak-anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia sedangkan mereka belum mencapai usia baligh. Batasan ini mencakup yatim yang masih ada hubungan kekerabatan dengan si pemeliharanya, ataupun dari orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Juga merupakan seseorang yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu, sedangkan yatim artinya seseorang yang tidak memiliki ayah, dan piatu adalah seseorang yang tidak memiliki ibu. Anak-anak yatim di kecamatan Tangan-Tangan ini sebahagian tinggal bersama nenek atau saudara sebelah ibunya, kebanyakan dari mereka tidak sekolah, akan tetapi mereka mendapat pendidikan di Tempat Pengajian Anak (TPA) terdekat.⁹⁴

Sedangkan Penyandang Disabilitas (PD) adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual. Juga meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Penurunan nilai adalah masalah dalam fungsi tubuh atau struktur; pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan; sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh seorang individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Usia Penyandang Disabilitas (PD) dari 18 tahun ke atas. Selanjutnya Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah keluarga yang rumah dan lingkungannya kumuh (kotor dan tidak teratur) untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Adapun ciri-ciri rumah

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kecamatan Tangan-Tangan adalah rumah bangunan berdinding papan, beratap rumbia, tidak mempunyai kamar, tidak mempunyai sumur dan berlantai tanah. Sedangkan Pengemis adalah orang yang memita-minta di tempat umum dan pada umumnya bertingka laku agar dibelas kasihan. Dan dijelaskan Keluarga Rentan (KR) adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.⁹⁵

Adapun keterangan atau kejelasan dari paparan keterangan di masing-masing *gampong* di kecamatan Tangan-Tangan tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Rekapitulasi Data PMKS Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Jenis PMKS	L	P	Total
1	Anak Dengan Kecacatan (ADK)	18	17	35
2	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	311	356	667
3	Penyandang Disabilitas (PD)	98	41	139
4	Pengemis	3	0	3
5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	0	92	92
6	Fakir Miskin (FM)	1012	265	1277
7	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	287	66	353
8	Keluarga Rumah Berumah Tidak Layak Huni (RTLH)	272	96	368
9	Keluarga Rentan (KR)	230	13	243
	Total	2.231	946	3.177

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya 2016.⁹⁶

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

⁹⁶Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya 2016.

C. Peran TKSK dalam Memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat Daya hampir setiap tahun membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 3.177 jiwa, dengan tingginya angka kemiskinan di kecamatan Tangan-Tangan di kabupaten Aceh Barat Daya maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan masih tergolong rendah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangatlah strategis dalam menunjang usaha dinas sosial di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Tangan-Tangan dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial.⁹⁷

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan pekerja sosial profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga adalah warga masyarakat *gampong* atau kelurahan yang telah memperoleh bimbingan atau pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan atau kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan.

Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator atau manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan.⁹⁸

⁹⁸Data TKSK Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam proses pertolongannya dan peranan pekerja sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara umum peran pekerja sosial dapat berperan sebagai:

1. Fasilitator atau Perencanaan dan Pemecahan Masalah

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya atau fungsinya sebagai fasilitator atau pendamping terhadap masyarakat demi kesejahteraan sosial masyarakat dilingkungan kecamatan Tangan-Tangan secara menyeluruh ke semua *gampong* yang ada di kecamatan Tangan-Tangan. Serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merancang perencanaan dalam pemecahan masalah yang di hadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti yang telah dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) membantu dalam membuat proposal yaitu ajuan permohonan bantuan ke pihak lembaga pemerintahan daerah sesuai dengan permintaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau masalah yang sedang dihadapi.⁹⁹

2. Mediator

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Tangan-Tangan merupakan pihak netral yang membantu para pihak khususnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 19 Agustus 2016.

cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian yang dihadapi oleh masyarakat. Ciri-ciri penting dari mediator seperti netral, membantu para pihak dan tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksa pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada pada pihak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan.

3. Pembimbing

Selain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan sebagai fasilitator atau pendamping, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga berperan pembimbing atau membimbing masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan untuk benar-benar menjalankan bentuk usaha bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini seperti bantuan modal usaha dan bantuan ternak dan sebagainya.¹⁰⁰

Adapun kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial di kecamatan Tangan-Tangan dapat dilihat dari beberapa strategi pekerja sosial seperti:

- a) Meningkatkan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan dalam menghadapi masalah yang dialaminya seperti pembinaan dan bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Seperti meningkatnya

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 19 Agustus 2016.

kemauan dalam memulai suatu usaha bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti usaha ternak dan membuka usaha-usaha lainnya seperti membuka kios-kios menjual barang-barang kelontong. hal ini untuk membantu dalam peningkatan pendapatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

- b) Menghubungkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, dan fungsi ini dalam membantu masyarakat agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, seperti bantuan layanan kesehatan dalam berobat serta bantuan yang di dapatkan oleh masyarakat ketika tertimpa musibah yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, angin kencang yang dapat menyebabkan rumah rusak. Anak-anak keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdata dalam mendapatkan beasiswa di sekolah. Serta Herda sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) khususnya di kecamatan Tangan-Tangan membantu masyarakat dalam membuat atau mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada pemerintah yang terkait seperti dinas sosial dalam bentuk permohonan bantuan modal usaha dan sebagainya.
- c) Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan

Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya oleh Dinas Sosial belum diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di kecamatan Tangan-Tangan. Sumbangsih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam fungsi ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian diserahkan dan ditindak lanjutin oleh dinas sosial.

- d) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan sebagai Fasilitator, berperan seperti mendorong anggota untuk berbagi dan berpartisipasi secara aktif, mengaitkan isu, gagasan, perasaan, pemikiran. Hal ini masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih terbuka kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam masalah yang di hadapinya. Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui kehadiran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah mendata masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan.
- e) Identifikator, peran ini terlihat ketika Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah kecamatan Tangan-Tangan.¹⁰¹

¹⁰¹BPS, *Kecamatan Tangan Tangan Dalam Angka 2016*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pekerjaan sosial dalam kelompok fungsinya sebagai pekerja sosial adalah memberikan kepemimpinan yang memungkinkan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka dan bagi kelompok untuk mencapai maksud dan tujuannya yang disepakati.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat TKSK Dalam Menfasilitasi PMKS

Adapun faktor pendukung dan penghambat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalani profesinya sebagai fasilitator adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Setiap program sudah tentu mempunyai faktor yang melatarbelakangi timbulnya program tersebut dan setiap yang sudah di programkan tentunya mempunyai faktor pendukung jalannya program tersebut. Begitu pula halnya dengan program yang di alami oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun faktor pendukung antara lain:

a. Kendaraan Dinas

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan Tangan-Tangan diberikan fasilitas satu unit kendaraan sepeda motor dalam memudahkan proses dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Tangan-Tangan dalam memudahkan untuk mengakses data atau mendata masyarakat di setiap *gampong* yang ada di kecamatan Tangan-

Tangan kabupaten Aceh Barat Daya khususnya. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan ibu Zahara mengatakan:

Menurut Zahara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Tangan-Tangan, menjelaskan bahwa: “Faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah Keuchik di semua *gampong* di kecamatan Tangan-Tangan, kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan, adanya data yang di perlukan di setiap *gampong*, adanya pekerja sosial masyarakat di *gampong*, adanya sumber-sumber kesejahteraan sosial, kendaraan dinas serta gaji yang memadai.”¹⁰²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa faktor pendukung terhadap memfasilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana tersebut di atas artinya di samping adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas dalam pendataan di *gampong-gampong* ada juga yang membentuk kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menentukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lingkungan masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan, ini merupakan suatu hal yang akan memaksimalkan terhadap kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hal ini juga merupakan respon dari masyarakat yang menandai adanya keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di lingkungan mereka sangat membantu dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Serta adanya pekerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja dengan maksimal serta perhatian pemerintah Aceh yang sangat merespon terhadap program pembentukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tersebut

¹⁰²Hasil wawancara dengan Abdul Rahman, (Masyarakat Penerima Manfaat *Gampong Mesjid*), Tanggal 17 Agustus 2016.

yaitu dengan diberikannya kepada masing-masing Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berupa satu unit alat transportasi kendaraan dinas.

b. Gaji/Jasa

Adapun faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah diberikan gaji/jasa perbulannya Rp.1.600.000. hal ini sedikit tidaknya dapat membantu keperluan atau kebutuhan sehari-hari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) khususnya di kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya.

c. Bantuan Modal Usaha

Faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)lainnya dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah memberikan modal usaha yang di berikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat, artinya dalam menjalankan usaha masyarakat telah diberikan modal untuk membuka usaha-usaha tertentu yang digelutinya. Selain itu, sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap modal usaha tersebut juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.Tidak menggunakan modal usaha untuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat yaitu hanya mempergunakan hasil usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.¹⁰³

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

Menurut penjelasan Darmiati menjelaskan bahwa, “bantuan yang di berikan kami manfaatkan seluruhnya untuk kebutuhan terhadap usaha yang kami geluti, seperti dalam usaha ternak kambing, maka penggunaan modal tersebut kami gunakan untuk sesuatu yang dibutuhkan untuk melancarkan usaha tersebut.”¹⁰⁴

Menurut penjelasan warga bahwa, dari bantuan yang di berikan oleh pemerintah atau dinas sosial sesuai dengan masalah yang di hadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan mereka memanfaatkannya dengan baik. Seperti keluarga berumah tidak layak huni, dari bantuan yang mereka dapatkandimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga.Masyarakat dengan kecacatannya mereka diberikan bantuan berupa kursi roda.Pada umumnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti beras miskin (Raskin) setiap bulannya.

Pemerintah maupun dinas sosial memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat setempat. Bagi masyarakat perternak di berikan bibit bebek dalam kelompok per lorong, 1 kelompok per lorong diberikan bibit bebek 35 ekor.Hal ini membantu usaha masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan.Adapun bantuan rumah masyarakat yang tertimpa musibah terkena angin di berikan triplek 10 lembar dan terpal atau tikar yang di berikan oleh dinas sosial.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan seksi kesejahteraan sosial kecamatan maka akan

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Darmiati, (Masyarakat Penerima Manfaat *Gampong* Mesjid), Tanggal 18 Agustus 2016.

mendukung dalam memfasilitasi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Adapun keaktifan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mendatangi masyarakat dalam melihat kebenaran yang di alami oleh PMKS, sebelum melakukan kunjungan di rumah-rumah masyarakat di kecamatan Tangan-Tangan, Herda (TKSK di kecamatan Tangan-Tangan) melakukan komunikasi kepada bapak Keuchik *gampong* yang bersangkutan. Pertemuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan para penerima manfaat biasanya dilakukan pada waktu sore, dengan alasan jikalau di waktu pagi, masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari seperti aktivitas berdagang, berternak, sawah, berkebun dan sebagainya.¹⁰⁵

2. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan peran yang diemban ada beberapa peran yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga memerlukan pengorbanan kepentingan-kepentingan pribadi dalam pelaksanaan perannya, dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pemilik peran terkadang dalam menjalankan perannya menghadapi kesulitan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perannya sebagai pekerja sosial dimana sesuai dengan yang disampaikan pada data yang sudah disampaikan pada data yang sudah disampaikan peneliti bahwa:

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan mengaku kesulitan ketika terjadi perubahan cuaca dan kondisi geografis yang ada di kecamatan Tangan-Tangan dimana jarak antar *gampong* yang menjadi wilayah kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak mungkin ditempuh tanpa menggunakan alat transportasi terutama pada malam hari, sehingga dari dinas sosial kecamatan Tangan-Tangan menyediakan atau memberikan fasilitas berupa sepeda motor.¹⁰⁶

Dikatakan bahwa apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut, pada poin ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan bahwa ketika Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menjalankan perannya sebagai pengumpul data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di wilayah kerjanya, para pemilik data terkesan menyembunyikan data tersebut, seperti yang ada pada data yang disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa data yang diberikan oleh pemilik data tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah kerjanya karena jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada pada data yang diberikan pemilik data jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ketika melakukan survey.

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 18 Agustus 2016.

Ketidakterbukaan pemilik data dalam memberikan data pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sesuai dengan yang disampaikan bahwa terkadang masyarakat dalam hal ini pemilik data terkesan membatasi peran yang dimiliki oleh individu, ketidakterbukaan pemilik data pada data yang diberikan pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) disebabkan oleh pada pemilik data dalam hal ini kepada *gampong* malu menyampaikannya karena akan dinilai *gampong* yang dipimpinnya tidak berhasil.¹⁰⁷

Dalam menjalankan peran selain faktor pendukung dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana telah penulis uraikan di atas, juga terdapat faktor penghambat.

Adapun faktor penghambat diantaranya sebagaimana dijelaskan oleh kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, bahwa pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai kepanjangan tangan atau wakil dari Dinas Sosial di wilayah kecamatan dirasakan masih kurang optimal. Belum semua bidang yang ada di dinas sosial memberdayakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai wakil dari dinas sosial tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing termasuk di kecamatan Tangan-Tangan.

Hal ini berakibat kurang pengakuan dari pemerintah daerah kecamatan dan pemerintah *gampong* di lingkungan kecamatan setempat terhadap kewenangan

¹⁰⁷Hasil Observasi Tanggal 16 Agustus 2016.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai wakil dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.¹⁰⁸

Kebanyakan pemerintah kecamatan dan pemerintah *gampong* hanya memandang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selayaknya tenaga musiman seperti sensus penduduk. Hal ini disebabkan karena hanya baru di bidang penghimpunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diberdayakan secara optimal artinya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) lebih banyak kegiatannya dibidang pendataan adakala dibidang ide-ide program pemberdayaan yang strategis untuk di kembangkan di lingkungan masyarakat itu sendiri tidak terlihat.¹⁰⁹

Padahal jika dilihat dari petunjuk teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tugas seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bukan hanya penghimpunan data, tapi juga mencakup memantapkan kerjasama dengan camat dan pihak lain untuk melaksanakan kesejahteraan sosial di kecamatan, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Selain itu, menurut penjelasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kecamatan Tangan-Tangan menjelaskan bahwa faktor penghambat kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan masyarakat secara umum adalah “Karena setiap satu kecamatan anggota Tenaga

¹⁰⁸Data TKSK di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

¹⁰⁹Data Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Aceh, Tanggal 19 Agustus 2016.

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya satu orang. Hal ini merupakan suatu hal yang berat dikerjakan bila wilayah kerjanya untuk satu kecamatan.”¹¹⁰

Dengan demikian, yang menjadi faktor penghambat anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah disebabkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terlalu luas jangkauan kerjanya yaitu mencakup satu kecamatan masing-masing untuk satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kurangnya dana pemberdayaan dari Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk Program pemberdayaan yang akan di lakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Lebih lanjutnya Herda juga mengatakan yang menjadi penghambat “Kurangnya masyarakat untuk membuka usaha (masyarakat selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah) karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang usaha.”¹¹¹

¹¹⁰Hasil Wawancara dengan Herda, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 20 Agustus 2016.

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Herda Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tangan-Tangan, Tanggal 20 Agustus 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertujuan untuk menyukseskan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di kecamatan Tangan-Tangan.
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan aktif dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan. Terlihat dari mulai pendataan dan juga pendampingannya. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada *gampong-gampong* yang ada di kecamatan Tangan-Tangan juga masih kurangnya dukungan, bantuan, pengakuan, dan juga sinergitas antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pihak pemerintah.

3. Adapun faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial di kecamatan Tangan-Tangan adalah adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), adanya data yang diperlukan di setiap *gampong*, adanya pekerjaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja dengan baik serta perhatian pemerintah yang sangat respon terhadap program tersebut yaitu dengan diberikannya pada masing-masing Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berupa kendaraan dinas dan gaji yang memadai terhadap pegawai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
4. Adapun faktor penghambat adalah di sebabkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terlalu luas jangkauan kerjanya yaitu mencakup satu kecamatan masing-masing untuk satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

B. Saran-Saran

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya perlu dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu penegasan terkait posisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai petugas atau masih sekedar relawan.
2. Perlu penambahan jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah kecamatan Tangan-tangan, karena mengingat wilayah kerja yang

begitu luas sehingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kesulitan untuk menjangkau semua wilayah kerja.

3. Perlu adanya dukungan, bantuan, pengakuan, dan juga sinergitas antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pihak pemerintah, PKSK diwilayah, maupun sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Aziz Al-Khayyat, 1994, *Etika Kerja dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Burhan Bungin, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2011, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- BPS, 2016, *Kecamatan Tangan Tangan Dalam Angka 2016*, (Kabupaten Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya).
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian (Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Conny Semiawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia.
- Dinas Sosial Provinsi Aceh, 2008, *Panduan TKSK*.
- Dadang Supardan, 2009, *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- _____, 2008, *Pendekatan Makro dan Mikro Dalam Pekerjaan Sosial, Bunga Rampai Kajian Teoritis dan Empiris*, Bandung: STKS Press.
- Etta Mamang Sengaji, Sopiah, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Husen Umar, 2005, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah Ya'qub, 1992, *Etos Kerja Islami*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hartono, 1996, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt Rineka Cipta.

- Isbandi Rukminto Adi, 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Imam Suprayoga, 2003, Tabroni, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Izal Bahri, 2013, *Partisipasi Masyarakat Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam Mengimplementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Skripsi*, Tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry.
- Juliansyah Noor, 2011, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta.
- Koetjaraningrat, 2002, *Pengantar Ilmu Antrologi*, Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2007, *NAD Punya TKSK*, Jakarta: Buletin Sinar.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Machali, Imam, Civil Society, 2009, *Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal PMI Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- M. Munanddar Soelaeman, 1986, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refik Saditama.
- M. Quraisy Syihab, 1995, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Masrizal, 2015, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- M. Jakfar Puteh, dkk., 2014, *Islam dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Teoritik dan Aplikatif)*, Yogyakarta: Parama Publishing.
- Mizan, 2012, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Skripsi*, tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry.

- Mohammad Suud, 2006, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Muhammad Teguh, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasir Budiman, dkk, 2004, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Ar-Raniry.
- Pajar Hatma Indra Jaya, 2008, *Analisis Masalah Sosial (Breakdown Teori-Teori Sosial Menuju Praksis Sosial)*, Yogyakarta: Pt LKiS Pelangi Aksara.
- Rekapitulasi Data PMKS Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015.
- Sabirin, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Saridah, 2013, *Strategi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Janda Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Trumon.Skripsi*, tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry.
- Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Vaithzal Rivai, 2004, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Pt Tiara Wacana.

DAFTAR WAWANCARA

1. Berapa lama program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dijalankan...?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)...?
3. Bagaimana prosedur pembinaan dilakukan oleh pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)...?
4. Apa tujuan dibentuknya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)...?
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)...?
6. Sejauh mana partisipasi TKSK dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)...?
7. Setelah dijalankan program TKS di kecamatan Tangan-Tangan bagaimana tanggapan dari masyarakat...?
8. Sejauh mana keberhasilan TKSK dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan...?
9. Apa saja yang menjadi faktor pendukung TKSK dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan...?
10. Apa saja yang menjadi faktor penghambat TKSK dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Tangan-Tangan...?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : ABDUL GAFUR
Nim : 441106482
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Bak Jeumpa, 02 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
No. Telp/HP : 085270459223
pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Peuniti kecamatan Baiturrahman Kota
Banda Aceh.

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Tangan-Tangan Tahun Lulus: 2005
SLTP : SMPN 1 Tangan-Tangan Tahun Lulus: 2008
SMA : SMAN 1 Tangan-Tangan Tahun Lulus: 2011
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2011 Sampai dengan
sekarang.

Orang Tua/ wali

Ayah : Rajuddin
Ibu : Nur Insani
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : *Gampong* Padang Bak Jeumpa Kecamatan
Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Banda Aceh, 25 Januari 2017

Peneliti,

ABDUL GAFUR

NIM. 441106482